

## AKTIVITAS SOSIAL EKONOMI ETNIS TIONGHOA DI MALANG 1940-1959

**Moch Andi Septian**

Program Studi Pendidikan Sejarah  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Negeri Surabaya  
Email: [bella.21079@mhs.unesa.ac.id](mailto:bella.21079@mhs.unesa.ac.id)

**Drs. Artono, M.Hum**

S1 Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Negeri Surabaya  
Email: [artono@unesa.ac.id](mailto:artono@unesa.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini membahas aktivitas sosial ekonomi etnis Tionghoa di Malang pada rentang tahun 1940 hingga 1959. Masa ini merupakan periode penting yang mencakup akhir penjajahan Belanda, masa pendudukan Jepang, hingga awal kemerdekaan Indonesia. Etnis Tionghoa memainkan peranan signifikan dalam kehidupan ekonomi Malang, khususnya dalam bidang perdagangan, jasa, dan usaha kecil-menengah. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi bentuk aktivitas ekonomi yang dijalankan etnis Tionghoa di Malang, (2) menganalisis pola kehidupan sosial mereka dalam konteks lokal dan nasional, serta (3) melihat bagaimana perubahan politik dan sosial memengaruhi posisi dan peran mereka dalam masyarakat. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan sejarah, melalui empat tahapan utama: heuristik (pengumpulan sumber), kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Sumber data diperoleh dari arsip, surat kabar lama, wawancara, dan literatur sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etnis Tionghoa di Malang memiliki jaringan ekonomi yang kuat, terutama di sektor perdagangan dan jasa. Mereka juga membentuk komunitas sosial yang solid melalui organisasi kemasyarakatan dan lembaga pendidikan. Namun, dinamika politik dan ketegangan sosial di masa revolusi kemerdekaan turut memengaruhi posisi sosial mereka, baik secara ekonomi maupun kultural.

**Kata Kunci:** Etnis Tionghoa, Malang, Sosial Ekonomi, 1940–1959

### Abstract

*This study discusses the socio-economic activities of the Chinese ethnic group in Malang during the period from 1940 to 1959. This timeframe encompasses the end of Dutch colonial rule, the Japanese occupation, and the early years of Indonesian independence. The Chinese community played a significant role in Malang's economic life, especially in the areas of trade, services, and small-scale enterprises. The aims of this study are: (1) to identify the forms of economic activities carried out by the Chinese ethnic group in Malang, (2) to analyze their patterns of social life in both local and national contexts, and (3) to examine how political and social changes affected their position and role in society. This research uses a descriptive qualitative method with a historical approach, involving four main stages: heuristics (source collection), source criticism, interpretation, and historiography. The data sources include archives, old newspapers, interviews, and secondary literature. The findings reveal that the Chinese ethnic group in Malang had a strong economic network, particularly in trade and services. They also formed cohesive social communities through civic organizations and educational institutions. However, the political dynamics and social tensions during the Indonesian revolution also impacted their social standing, both economically and culturally.*

**Keywords:** Chinese Ethnic Group, Malang, Socio-Economic, 1940–1959

## PENDAHULUAN

Kehadiran etnis Tionghoa di Malang diperkirakan sudah dimulai sejak awal abad ke-19. Bukti paling awal dapat dilihat dari prasasti di Kelenteng Eng An Kiong yang didirikan pada tahun 1825<sup>1</sup>, menunjukkan bahwa komunitas Tionghoa sudah bermukim dan aktif secara sosial di wilayah ini sejak tahun 1820-an. Pemukiman mereka awalnya berada di sekitar Jalan Laksamana Martadinata dan berkembang di pusat kota Malang. Pelayaran mereka dari Tiongkok ke Jawa melalui rute timur dan barat telah berlangsung jauh sebelum kedatangan bangsa Portugis, dan menunjukkan keterhubungan historis yang kuat antara Tiongkok dan kepulauan Nusantara<sup>2</sup>.

Migrasi besar-besaran etnis Tionghoa ke Jawa, termasuk Malang, dipicu oleh runtuhnya Dinasti Qing dan Perang Candu yang menyebabkan ketidakstabilan politik dan kemiskinan di Tiongkok<sup>3</sup>. Pada awalnya, para perantau berasal dari golongan saudagar kaya yang membawa barang mewah seperti sutra dan keramik<sup>4</sup>. Namun, gelombang migrasi berikutnya didominasi oleh masyarakat kelas bawah yang datang dengan harapan memperbaiki nasib. Mereka umumnya hanya bermodalkan tenaga dan tekad, mengikuti jejak kerabat yang sudah lebih dahulu menetap di Malang.

Komunitas Tionghoa membentuk koloni-koloni kecil yang tersebar di beberapa wilayah Malang seperti Kotalama, Kidul Pasar, Claket, Sukorejo, dan Jodipan<sup>5</sup>. Kawasan-kawasan ini kemudian dikenal sebagai Pecinan. Aktivitas ekonomi mereka berkembang pesat, khususnya di sektor perdagangan karena Malang memiliki posisi geografis strategis dan iklim yang sejuk. Kehidupan sosial dan ekonomi komunitas ini cukup mapan, dengan permukiman yang teratur secara tata ruang dan fungsi. Mereka tinggal di rumah-rumah sederhana, ruko kecil, bahkan petak-petak rumah seperti sistem istal di Surabaya<sup>6</sup>.

Interaksi antara etnis Tionghoa dan masyarakat pribumi di Malang sejak awal abad ke-20 berjalan cukup harmonis. Penduduk lokal sudah terbiasa dengan keberadaan kelompok etnis lain seperti Arab dan Eropa, sehingga akulturasi dapat berlangsung dengan relatif lancar. Di tengah keterbatasan ekonomi, komunitas Tionghoa tetap berperan dalam kegiatan sosial. Salah satu contohnya adalah berdirinya organisasi *Tiong Hwa Ie Sia* pada tahun 1920-an yang bergerak di bidang kesehatan<sup>7</sup>. Organisasi ini mendirikan klinik kecil di

daerah kumuh dengan inisiatör utama Nyonya Go Gwat Tjing, yang dikenal sebagai Bu Bidan Kampung.

Dalam kesejarahan, komunitas Tionghoa tetap menjaga tradisi leluhur seperti perayaan Imlek, Terang Bulan, dan upacara pernikahan. Namun, tekanan politik pada masa Revolusi dan awal Orde Lama menyebabkan pelaksanaan tradisi tersebut mengalami penyesuaian. Beberapa upacara dijalankan secara terbatas atau bahkan dihentikan sementara karena situasi politik yang tidak stabil dan tekanan dari pemerintah pusat. Meskipun begitu, etnis Tionghoa di Malang tetap berusaha menjaga identitas budaya mereka di tengah berbagai tantangan yang ada<sup>8</sup>.

Memasuki masa Demokrasi Liberal (1950–1959) di bawah pemerintahan Presiden Soekarno, kebijakan terhadap etnis Tionghoa mulai menunjukkan kecenderungan diskriminatif. Administrasi kependudukan yang rumit, pembatasan ekonomi, serta sentimen anti-Tionghoa mulai mengemuka. Tragedi Mergosono tahun 1947 menjadi salah satu peristiwa yang menunjukkan bagaimana ketegangan rasial berdampak pada keamanan komunitas Tionghoa. Kekerasan, penjarahan, dan ketakutan sempat menghantui kehidupan mereka di berbagai kota di Indonesia.

Namun, di Malang, situasinya relatif lebih kondusif. Meski tekanan politik tetap terasa, kehidupan sehari-hari antara warga Tionghoa dan pribumi berlangsung tanpa banyak gesekan. Hubungan sosial yang harmonis telah terbangun sejak lama dan menjadi kekuatan utama dalam menjaga stabilitas antar komunitas<sup>9</sup>. Pembauran dan akulturasi budaya yang telah mengakar membuat Malang menjadi salah satu kota di mana etnis Tionghoa tetap dapat mempertahankan eksistensinya dengan lebih tenang dibandingkan wilayah lain yang mengalami gejolak rasial lebih kuat<sup>10</sup>.

Dari beberapa hal yang dijelaskan diatas tersebut menarik kiranya untuk mengupas mengenai kehidupan sehari-hari etnis Tionghoa Malang masa Orde Lama<sup>11</sup>. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa keunikan dalam komunitas Tionghoa di Malang. Pertama, awal mula masuknya etnis Tionghoa di Malang dan topik terkait adanya pemilihan lingkungan kumuh yang disulap menjadi sebuah RS Panti Nirmala sebagai RS terbaik di Malang. Kedua adalah Tragedi mergosono 1947 yang mengancam Etnis Tionghoa

<sup>1</sup> Andjarwati Noordjannah, Komunitas Tionghoa di Surabaya (Yogyakarta: Ombak, 2010), hlm. 1

<sup>2</sup> R.Z. Leirissa, Sejarah Maritim Indonesia: Jalur Rempah dan Dinamika Asia Tenggara (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2021), hlm. 45–47.

<sup>3</sup> “Sejarah Komunitas Tionghoa di Malang,” Malang Retro, diakses pada 27 Februari 2025.

<sup>4</sup> Hari Poerwanto, Orang Tiongkok Khek Dari Singkawang (Depok: Komunitas Bambu, 2005), hlm. 43.

<sup>5</sup> “Menilik Sejarah dan Dinamika Pecinan Malang,” Terakota.id, diakses 27 Februari 2025.

<sup>6</sup> “Sejarah Pecinan di Kota Malang Sejak Zaman Kolonial,” detik.com, diakses 27 Februari 2025

<sup>7</sup> Wawancara dengan wakil ketua pengurus perkumpulan Dharma Warga Malang bapak Ken Kriswanto (Den Jian Kang) pada 2 februari 2025 pukul 11.00 WIB di kantor Perkumpulan Dharma Warga.

<sup>8</sup> Leo Suryadinata, Dilema Minoritas Tionghoa (Jakarta: Grafiti Pers, 1984).

<sup>9</sup> Yunita Ariani, “Sejarah Permukiman Etnis Tionghoa di Malang,” Jurnal Sejarah dan Budaya 14, no. 2 (2022): 45, <https://journal2.um.ac.id/index.php/sejarah-dan-budaya/article/download/29834/10952>

<sup>10</sup> Suryadinata, Leo. Etnis Tionghoa dan Nasionalisme Indonesia. Jakarta: LP3ES, 1999, hlm. 75–77.

<sup>11</sup> Leo Suryadinata, “Negara dan Etnis Tionghoa: Kasus Indonesia” (Jakarta: LP3ES, 2009).

Malang. Dan ketiga adalah aktifitas sehari-hari etnis Tionghoa Malang dan interaksinya dengan warga pribumi yang terjalin baik di dalam arus rasialis yang menerpa.

## METODE PENELITIAN

Metode yang diapakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah yang terdiri dari tahapan heuristik (pengumpulan sumber sejarah), verifikasi data, interpretasi, dan historiografi.

Pada tahapan heuristik dilakukan pengumpulan sumber sejarah, penulis menggunakan sumber primer berupa dokumen tertulis dan wawancara lisan<sup>12</sup>. Sumber tertulis diperoleh dari arsip dan surat kabar, seperti Arsip Kompas, Depo Arsip Suara Merdeka, Surabaya Pos, serta data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang. Selain sumber primer tertulis, Peneliti juga memanfaatkan sumber lisan dengan mewawancarai individu yang memiliki pemahaman mendalam tentang komunitas etnis Tionghoa di Kabupaten Malang.

Selanjutnya, peneliti melakukan verifikasi data dengan cara melakukan koreksi data wawancara yang dilakukan dengan tokoh-tokoh etnis Tionghoa, seperti Kong Halim Wijaya 70 Tahun, yang hidup pada periode yang sama dengan lingkup temporal penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan sumber sekunder berupa buku, jurnal, dan skripsi yang relevan dengan topik yang dibahas. Sumber-sumber tersebut diperoleh dari Perpustakaan Jurusan Pendidikan Sejarah, Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Timur, dan Perpustakaan Daerah Malang.

Tahapan yang ketiga adalah interpretasi yaitu proses memahami dan menghubungkan berbagai fakta yang telah dikumpulkan dalam penelitian sejarah. Agar suatu peristiwa dapat disusun menjadi kisah sejarah yang utuh dan bermakna, fakta-fakta yang terpisah perlu dirangkai secara logis. Namun, tidak semua fakta dapat dimasukkan dalam interpretasi, hanya informasi yang relevan dengan alur cerita yang akan disusun yang dipilih.

Pada tahap terakhir peneliti melakukan historiografi. Historiografi adalah tahap akhir dalam penelitian sejarah, di mana fakta-fakta yang telah diinterpretasikan disusun menjadi sebuah narasi sejarah. Pada tahap ini, peneliti menyajikan hasil penelitian dalam bentuk cerita sejarah yang jelas dan terperinci berdasarkan temuan yang diperoleh. Dalam penelitian ini, historiografi diwujudkan dalam bentuk skripsi

berjudul Aktivitas Sosial Ekonomi Etnis Tionghoa di Malang 1940-1959.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Sejarah Kedatangan Etnis Tionghoa di Malang

Sejak beberapa abad lalu, Kota Malang telah dihuni oleh berbagai suku bangsa yang hidup berdampingan, termasuk komunitas Tionghoa yang menjadi salah satu kelompok etnis yang cukup menonjol dalam struktur sosial kota ini<sup>13</sup>. Kedatangan mereka ke Malang diperkirakan sejak gelombang migrasi besar pada abad ke-17, dan mereka membentuk komunitas sendiri yang sejajar dengan kelompok pendatang lainnya<sup>14</sup>. Komunitas Tionghoa di Malang mayoritas berasal dari provinsi selatan Tiongkok seperti Fujian dan Guangdong<sup>15</sup>.

Kelompok Tionghoa yang pertama kali menetap di Malang umumnya berasal dari suku Hokkian, yang dikenal memiliki keahlian dalam bidang perdagangan<sup>16</sup>. Kemudian disusul oleh kelompok Hakka (Khek), Kanton (Guangdong), Tiochiu (Chaozhou dan Swatow), serta Hainan dari Pulau Hainan<sup>17</sup>. Selain itu, terdapat pula kelompok lain dalam jumlah kecil seperti Hak Tjia, Hing Hua, Hok Tjioe, Ching Chiang, Hoklo, dan Tsoan Tsiu, serta imigran minor dari Hai Lok Hong, Loe Tjioe, Macao, dan Kioe Shen<sup>18</sup>.

Kehadiran orang Tionghoa di Malang sebagian besar diawali dari jalur perdagangan, baik setelah singgah di pelabuhan-pelabuhan Nusantara maupun langsung dari Tiongkok, memanfaatkan angin muson sebagai jalur pelayaran<sup>19</sup>. Bersama pedagang asing lain seperti Melayu, Portugis, dan Jawa, mereka membawa pengaruh besar dalam pertumbuhan ekonomi wilayah ini.

Pada dekade 1970-an hingga awal 2000-an, etnis Tionghoa yang jumlahnya sekitar 3% dari populasi Indonesia atau sekitar enam juta jiwa dikenal memiliki kekuatan ekonomi yang signifikan<sup>20</sup>. Mereka mendominasi sektor perdagangan dan turut berperan dalam bidang keuangan serta industri. Keberadaan mereka telah memberi kontribusi besar dalam perkembangan sosial dan budaya Kota Malang, menjadikan etnis Tionghoa sebagai bagian penting dalam dinamika kehidupan masyarakat kota ini.

<sup>12</sup> Sjamsuddi, Helius. 2007. Metodologi Sejarah.

Yogyakarta: Penerbit Ombak.

<sup>13</sup> Suryadinata, Leo. The Chinese Minority in Indonesia: Seven Papers. Singapore: ISEAS Publishing, 2007.

<sup>14</sup> Mona Lohanda, The Kapitan Tionghoa of Batavia 1837-1942, (Jakarta: Djambatan, 2001), hlm. 10.

<sup>15</sup> Shaifuddin Bahrum, Cina Peranakan Makassar, Pembauran Melalui Perkawinan Antarbudaya, (Makassar: Yayasan Baruga Nusantara, 2003), hlm. 38.

<sup>16</sup> Leo Suryadinata. Negara dan Etnis Tionghoa, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2002), Hlm. 119

<sup>17</sup> Mona Lohanda, The Capitan Tionghoa of Batavia

1837-1942, (Jakarta: Djambatan, 2001), Hlm. 10

<sup>18</sup> Yerry Wirawan. Sejarah Masyarakat Tionghoa Dari Abad Ke-17 Hingga Ke-20. (Jakarta: Kepustakaan Popular Gramedia, 2013) Hlm. 5

<sup>19</sup> Ong Hok Ham, Riwayat Tionghoa Peranakan di Jawa (Jakarta: Kompas, 2003), hlm. 45.

<sup>20</sup> A. Dahana. "Kegiatan Awal Masyarakat Tionghoa di Indonesia" Jurnal Wacana. Vol. 2. No. 1 (April 2000). Hlm. 56

Tabel 1. Suku Bangsa Tionghoa di Malang Tahun 1930

Suku	Lahir di Hindia Belanda	Lahir di Luar Hindia Belanda	Jumlah
Hokkian	4.792	1.108	5.900
Hakka	103	156	259
Teo-Ciu	23	20	43
Kwang Fu (Canton)	370	800	1.173
Lain-lain	765	179	944
<b>Total</b>			<b>8.318</b>

Komunitas Hokkian merupakan kelompok Tionghoa pertama yang bermukim di Malang dalam jumlah besar, dan menjadi kelompok mayoritas di antara komunitas Tionghoa lainnya hingga memasuki abad ke-19, orang-orang Tionghoa yang berasal dari berbagai provinsi di Tiongkok mewakili beragam kelompok etnis, datang dengan membawa jenis barang dagangan yang beraneka ragam sesuai dengan asal-usul daerah mereka<sup>21</sup>. Masing-masing kelompok etnis Tionghoa dikenal memiliki komoditas unggulan yang berbeda satu sama lain.

Tabel 2. Usaha yang dilakukan oleh suku-suku Tionghoa Malang

No	Suku / Provinsi	Jenis Barang Dagangan / Usaha
1	Hokkian (Fujian)	Membawa barang dagangan lokal seperti teripang, lilin, agar-agar, sirip hiu, sarang burung, kulit penyu, dan kulit hewan.
2	Kanton (Guangdong)	Membawa barang seperti benang sutra, keramik, tembakau, teh, payung, benang emas, uang, serta peralatan dari besi atau tembaga.
3	Hakka (Guangdong)	Membuka usaha kelontongan dan mengelola toko toko obat di kota Malang.
4	Hainan	Mengelola warung kopi dan warung kecil di beberapa wilayah kota Malang karena kesulitan bersaing dengan suku

Pada awal kedatangannya ke Malang, komunitas Tionghoa terbagi menjadi dua kelompok

utama yaitu Tionghoa Peranakan dan Tionghoa Totok<sup>22</sup>. Peranakan adalah kelompok yang lebih awal menetap, menikah dengan penduduk lokal, dan berbaur dalam budaya pribumi. Sementara itu, Totok datang kemudian dengan membawa serta identitas budaya Tiongkok yang lebih kuat dan cenderung membentuk komunitas tertutup. Kedatangan mereka dipicu oleh semangat berdagang serta situasi politik tidak stabil di Tiongkok pada abad ke-17, mendorong migrasi besar-besaran ke Asia Tenggara, termasuk ke Malang<sup>23</sup>.

Malang sebagai daerah strategis dan subur menjadi pusat perdagangan hasil pertanian, rempah-rempah, dan hutan, yang menarik minat pedagang Tionghoa. Mereka menukar produk lokal dengan barang-barang impor seperti tekstil dan keramik. Bahkan pada tahun 1650-an, pedagang Tionghoa mulai menguasai perdagangan barang-barang mewah seperti kulit penyu<sup>24</sup>. Meski pada tahun 1750 jumlah mereka hanya sekitar 500 orang, populasi ini terus tumbuh hingga lebih dari 2.500 orang pada tahun 1895, beriringan dengan keterlibatan mereka dalam jaringan ekonomi lokal<sup>25</sup>.

Di era VOC dan kolonial Belanda, komunitas Tionghoa memainkan peran penting dalam perdagangan lokal meski Malang tak memiliki pelabuhan. Mereka bertindak sebagai perantara dagang antara wilayah pedalaman dan pelabuhan seperti Surabaya. Pemerintah kolonial Belanda kemudian memanfaatkan kemampuan baca tulis mereka untuk mengisi posisi administratif seperti pemungut pajak. Meskipun kemudian hak istimewa mereka dicabut, posisi komunitas Tionghoa dalam ekonomi lokal tetap kokoh, terutama dalam industri skala menengah.

Seiring waktu, pedagang Tionghoa mulai mendapatkan izin mendirikan badan usaha modern seperti N.V. dan perusahaan keluarga. Ini menandai masuknya komunitas Tionghoa dalam struktur ekonomi kolonial modern. Banyak imigran baru yang datang dari datar belakang miskin dan kemudian membentuk kelompok berdasarkan asal daerah atau keterampilan teknis untuk menghindari persaingan. Pada masa ini, komunitas Tionghoa juga mengelola bisnis strategis seperti opium, pegadaian, dan pasar, meski kemudian sistem monopoli ini dihapuskan oleh kebijakan baru kolonial<sup>26</sup>.

Belanda menerapkan politik pecah belah terhadap komunitas Tionghoa untuk mencegah aliansi dengan pribumi. Diskriminasi hukum juga diterapkan, seperti pembatasan tempat tinggal dan

<sup>21</sup> Dias Pradadimara & Muslimin A. R. Effendy. Kontinuitas & Perubahan Dalam Sejarah Sulawesi Selatan. (Yogyakarta: Penerbit Ombak, Oktober 2004) Hlm. 217

<sup>22</sup> Mona Lohanda, The Chinese in Java 1800–1942 (Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka, 1996), hlm. 150–152.

<sup>23</sup> Mona Lohanda, The Chinese in Java 1800–1942 (Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka, 1996), hlm. 40–45.

<sup>24</sup> Mona Lohanda, The Chinese in Java 1800–1942 (Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka, 1996), hlm. 50–55; Robert

Van Niel, The Emergence of a National Economy: An Economic History of Indonesia, 1800–2000 (Leiden: KITLV Press, 2001), hlm. 78–80.

<sup>25</sup> Yerry Wirawan, Sejarah Perdagangan Etnis Tionghoa di Nusantara (Jakarta: Pustaka Sejarah Nusantara, 2015), hlm. 72.

<sup>26</sup> Yerry Wirawan, Sejarah Etnis Tionghoa di Jawa Timur (Surabaya: Penerbit Sejarah Nusantara, 2018), hlm. 120.

beban pajak ganda. Akibatnya, kesadaran nasionalisme tumbuh, dipengaruhi oleh tekanan kolonial dan perubahan politik di Tiongkok, termasuk kekalahan Tiongkok dari Jepang pada 1895. Pada 1900-an, komunitas Tionghoa Malang membentuk organisasi seperti Tiong Hwa Siang Hwee untuk memperjuangkan kepentingan dagang, pendidikan, dan politik mereka<sup>27</sup>.

Pertumbuhan populasi Tionghoa di Malang meningkat pesat, dari sekitar 6.900 jiwa pada 1916 menjadi lebih dari 15.000 jiwa pada 1930. Mereka aktif dalam berbagai bidang seperti perdagangan, pendidikan, dan sosial. Namun saat pendudukan Jepang pada 1942, semua organisasi Tionghoa dibubarkan dan digantikan oleh satu wadah tunggal, Kakyo Kyokai, yang mengatur komunitas secara ketat serta mendukung kepentingan Jepang. Pedagang Tionghoa tetap dibutuhkan, meskipun aktivitas mereka dibatasi dan semua transaksi dikendalikan oleh tentara Jepang melalui penerapan mata uang Jepang<sup>28</sup>.

Setelah masa pendudukan Jepang dan selama revolusi kemerdekaan, populasi Tionghoa di Malang diperkirakan mencapai 12.000–15.000 jiwa, atau sekitar 20% dari penduduk non-Tionghoa. Angka ini menunjukkan peran dan eksistensi komunitas Tionghoa yang signifikan dalam perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya Kota Malang, yang terus bertahan dan berkembang meski menghadapi berbagai tantangan dari masa kolonial hingga pendudukan militer<sup>29</sup>.

*Tabel 3. Pertumbuhan Penduduk Kota Malang 1905-1940*

Etnis	1905	1920	1930	1940
Bumiputera	24.274	35.165	70.662	142.286
Tionghoa	3.600	4.312	7.832	12.233
Etnis Lain	357	371	693	930
Eropa	1.353	3.504	7.463	13.867
<b>Total</b>	<b>29.584</b>	<b>43.352</b>	<b>86.650</b>	<b>169.316</b>

Antara tahun 1905 hingga 1940, jumlah penduduk Kota Malang mengalami peningkatan pesat, termasuk etnis Tionghoa yang tumbuh lebih dari 100%. Pola permukiman saat itu dibagi berdasarkan etnis: Eropa di barat daya alun-alun, Tionghoa di sekitar Pasar Besar (tenggara alun-alun), Arab di belakang Masjid Jami', dan Bumiputera di selatan alun-alun. Bersamaan dengan pertumbuhan kota, fasilitas pendidikan mulai berkembang dengan kehadiran sekolah-sekolah

<sup>27</sup> Leonard Blussé, Strange Company: Chinese Settlers, Mestizo Women and the Dutch in VOC Batavia (Dordrecht: Foris Publications, 1986), hlm. 92–95.

<sup>28</sup> Yerry Wirawan, Etnis Tionghoa di Indonesia: Dari Komunitas ke Komunitas (Yogyakarta: Ombak, 2010), hlm. 137.

<sup>29</sup> Yerry Wirawan, Etnis Tionghoa di Indonesia: Dari Komunitas ke Komunitas (Yogyakarta: Ombak, 2010), hlm. 85–87.

<sup>30</sup> Mely G. Tan, Etnis Tionghoa di Indonesia: Kumpulan Tulisan (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 47.

Eropa, Tionghoa, dan Bumiputera, termasuk sekolah berbahasa Mandarin seperti Tiong Hwee Kwan.<sup>30</sup>

Pada masa pendudukan Jepang tahun 1942, komunitas Tionghoa di Malang menghadapi penindasan, kerja paksa, dan pembatasan sosial-politik. Banyak yang mengungsi, lalu kembali setelah kekalahan Jepang pada 1945 dan mendapat kota dalam kondisi rusak. Upaya membangun kembali rumah dan toko mereka pun terkendala biaya tinggi dan keterbatasan lahan. Selama pendudukan, Jepang membubarkan organisasi Tionghoa dan menggantikannya dengan Kakyo Kyokai yang mengontrol aktivitas mereka, sekaligus mengawasi perdagangan dan memaksa penggunaan mata uang Jepang<sup>31</sup>.

Setelah kemerdekaan Indonesia, komunitas Tionghoa di Malang terbagi menjadi Totok (pendatang langsung dari Tiongkok) dan Peranakan (lahir dan tumbuh di Hindia Belanda). Keduanya memiliki gaya hidup dan pandangan berbeda, namun sama-sama berkontribusi dalam membangun komunitas. Meski aktivitas politik mereka dibatasi, beberapa tokoh seperti Liem Koen Hian memperjuangkan pengakuan warga Tionghoa sebagai bagian dari bangsa Indonesia, menandai tumbuhnya nasionalisme dalam komunitas tersebut. Populasi mereka diperkirakan meningkat menjadi sekitar 12.000–15.000 jiwa pada akhir 1940-an<sup>32</sup>.

Memasuki era Orde Lama, komunitas Tionghoa mulai berasimilasi dan membentuk organisasi sosial-budaya. Namun, kebijakan Indonesianisasi pada masa Demokrasi Parlementer membawa diskriminasi ekonomi, terutama melalui Sistem Benteng yang gagal memperkuat posisi ekonomi pribumi dan malah menciptakan ketegangan dengan komunitas Tionghoa. Meski menghadapi tekanan, para pengusaha Tionghoa tetap bertahan dengan menjunjung nilai-nilai seperti *hopeng* (relasi baik), *hong sui* (kepercayaan fengshui), dan *hoki* (keberuntungan), serta membangun jaringan ekonomi yang kuat.<sup>33</sup>

Pada 1950-an, tekanan politik dan ekonomi terhadap etnis Tionghoa meningkat<sup>34</sup>. Kebijakan pemerintah, termasuk pajak tinggi dan larangan berdagang di pedesaan, mendorong sebagian dari mereka bermigrasi ke Tiongkok atau kota besar lain. Masyarakat Tionghoa kelas menengah pun mulai berinvestasi besar dalam pendidikan teknis dan manajerial, memanfaatkan jaringan sosial dan dukungan modal keluarga. Puncaknya, Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1959 mewajibkan

<sup>31</sup> Leo Suryadinata, The Chinese Minority in Indonesia: Seven Papers (Singapore: Heinemann Educational Books, 1978), hlm. 52

<sup>32</sup> Charles A. Coppel, Indonesian Chinese in Crisis (Singapore: Oxford University Press, 1983), hlm. 65.

<sup>33</sup> Leo Suryadinata, Peran Etnis Tionghoa dalam Perekonomian Indonesia (Jakarta: LP3ES, 1991), hlm. 73.

<sup>34</sup> Leo Suryadinata, Peran Etnis Tionghoa dalam Perekonomian Indonesia (Jakarta: LP3ES, 1991), hlm. 85.

pedagang asing termasuk Tionghoa non-WNI untuk meninggalkan wilayah desa.

Situasi makin sulit ketika diskriminasi sosial dan budaya meningkat pada masa transisi politik. Tekanan ini dirasakan oleh semua lapisan etnis Tionghoa, baik Totok maupun Peranakan. Tragedi Mergono yang memakan korban jiwa dari warga Tionghoa di Malang menjadi bukti nyata meningkatnya sentimen anti-Tionghoa. Pemerintah saat itu melarang aktivitas organisasi dan budaya yang berakar pada tradisi leluhur, membatasi ruang hidup komunitas Tionghoa dan mendorong mereka untuk semakin tertutup dalam struktur masyarakat.

#### B. Aktivitas Sosial Ekonomi Etnis Tionghoa Malang

Pada masa 1940 hingga 1959, Kota Malang berkembang pesat sebagai pusat perdagangan dan aktivitas sosial di Jawa Timur<sup>35</sup>. Komunitas Tionghoa memainkan peran penting dalam perkembangan ekonomi dan sosial kota ini, tidak hanya sebagai pedagang dan pengusaha, tetapi juga melalui pembentukan lingkungan pemukiman khas seperti Pecinan. Pemukiman ini tumbuh akibat kebijakan kolonial Belanda seperti *Wijkenstelsel* tahun 1843, yang memaksa etnis Tionghoa tinggal di kawasan tertentu seperti sekitar Jalan Pasar Besar, Jalan Kawi, dan Jalan Agus Salim. Setelah kebijakan ini dihapus tahun 1918, komunitas Tionghoa mulai menyebar ke luar Pecinan.

Terdapat perbedaan pola hunian antara Tionghoa Totok dan Peranakan. Totok cenderung tinggal di toko-toko yang sekaligus dijadikan tempat usaha di pusat perdagangan, sementara Peranakan tinggal di kawasan seperti Jalan Veteran, dengan rumah bergaya arsitektur Barat yang mencerminkan status sosial. Meskipun menghadapi tekanan dan tragedi seperti insiden Margosono tahun 1947, komunitas ini tetap bertahan dan beradaptasi dengan situasi sosial-politik yang dinamis<sup>36</sup>.

Komunitas Tionghoa di Malang turut mendirikan berbagai lembaga sosial, tempat ibadah seperti Klenteng Eng An Kiong, dan organisasi seperti INTI (Indonesia Tionghoa) untuk memperkuat identitas kebangsaan dan solidaritas sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat lokal, terutama setelah menikah dan pindah dari Pecinan. Banyak dari mereka juga sudah fasih berbahasa Jawa dan tidak lagi menggunakan bahasa Mandarin dalam kehidupan sehari-hari, mencerminkan proses akulturasi yang kuat.

Meski sempat mengalami diskriminasi dan intimidasi, terutama setelah kemerdekaan Indonesia,

masyarakat Tionghoa tetap aktif dalam kegiatan sosial seperti gotong royong. Partisipasi mereka tidak selalu dalam bentuk kehadiran fisik, tetapi sering diwujudkan melalui bantuan materi. Kehidupan multikultural di Malang memberi ruang bagi etnis Tionghoa untuk menunjukkan peran dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya secara inklusif.

Dalam bidang ekonomi, etnis Tionghoa mendominasi sektor perdagangan sejak masa kolonial Belanda. Mereka menjadi perantara antara bumiputra dan pihak Eropa, dengan konsentrasi usaha di kawasan Pecinan akibat sistem pemukiman segregatif *Wijkenstelsel*. Data sensus tahun 1930 menunjukkan bahwa sebagian besar orang Tionghoa di Malang berprofesi sebagai pedagang<sup>37</sup>.

Tabel 4. Jenis Pekerjaan orang Tionghoa Malang

	Jenis Pekerjaan	Lahir di Hindia Belanda	Lahir di Luar Hindia Belanda	Total
I	Produksi Bahan Mentah	26	12	38
II	Industri Kerajinan	195	568	763
	Industri Makanan	76	110	186
	Pengolahan Logam	8	28	36
	Pengrajin Kayu dan Bambu	23	298	321
	Alat Pengangkutan	14	13	27
III	Industri Pakaian	22	105	127
	Transportasi	80	8	88
	Transportasi Umum	74	8	82
VI	Perdagangan	590	875	1456
	Makanan	102	124	226
	Tekstil	68	311	379
	Perdagangan Aneka Macam	304	354	658
	Perkreditan	13	15	28
V	Usaha Bebas	47	36	83
VI	Pelayanan Umum	18	-	18
VII	Lain-lain	43	21	64

<sup>35</sup> Arief Budiman, Etnis Tionghoa di Indonesia: Sejarah, Sosial, dan Politik (Jakarta: LP3ES, 2006), hlm. 112-115; Leo Suryadinata, The Chinese Minority in Indonesia: Policy, Conflict and Change (Singapore: ISEAS Publishing, 2015), hlm. 97-100.

<sup>36</sup> Kiki Patmila Akbar, "Masyarakat Muslim Tionghoa di Kota Makassar Tahun 1969 1998". (Makassar, Unhas: Skripsi Departemen Ilmu Sejarah, 2020) Hlm. 33

<sup>37</sup> "Menilik Akar Sejarah dan Dinamika Pecinan Malang," Terakota.id, diakses 27 Mei 2025, <https://www.terakota.id/menilik-akar-sejarah-dan-dinamika-pechinan-malang>

### C. Kebijakan Pemerintah Terhadap Aktivitas Sosial Ekonomi Etnis Tionghoa Malang

Kota Malang sejak lama dikenal sebagai wilayah multietnis yang dihuni oleh berbagai kelompok pendatang. Salah satu komunitas yang telah menetap dan berkembang di kota ini adalah orang-orang Tionghoa. Kehadiran mereka diperkirakan telah dimulai sejak awal abad ke-19, bahkan ada yang menyebut sejak abad ke-17, seiring dengan meningkatnya aktivitas perdagangan maritim di wilayah Nusantara. Komunitas Tionghoa datang sebagai bagian dari gelombang migrasi besar-besaran yang terjadi dari Tiongkok Selatan menuju Asia Tenggara<sup>38</sup>.

Sebagian besar orang Tionghoa yang datang dan menetap di Malang berasal dari provinsi-provinsi selatan Tiongkok seperti Fujian, Guangdong, dan Guangxi. Mereka terbagi dalam beberapa sub-etnis atau suku, di antaranya Hokkian (Fujian selatan), Kanton (Guangdong barat), Hakka atau Khek (pedalaman Guangdong), Tiochiu/Tio Tjoe (Chaozhou dan Swatow), dan Hainan (Pulau Hainan). Masing-masing kelompok membawa bahasa, budaya, dan keterampilan berbeda, meskipun secara umum mereka memiliki ikatan kultural sebagai bagian dari diaspora Tionghoa.

Kelompok Hokkian disebut-sebut sebagai perantau awal yang menetap di Malang. Mereka dikenal memiliki kemampuan dagang yang tinggi dan cepat menyesuaikan diri dengan kehidupan sosial ekonomi di daerah tujuan. Kemudian disusul oleh kelompok Hakka, Kanton, dan lainnya. Selain itu, terdapat pula kelompok Tionghoa dalam jumlah lebih kecil seperti Hok Tjoe, Ching Chiang, Hing Hua, Tsoan Tsiu, hingga yang berasal dari Macao, Loe Tjoe, dan Kioe Shen. Meskipun jumlahnya lebih sedikit, kehadiran mereka turut memperkaya keragaman internal dalam komunitas Tionghoa di Malang.

Pada masa kolonial Belanda, orang-orang Tionghoa mengalami segregasi sosial melalui kebijakan *Wijkenstelsel*, yang memaksa mereka tinggal di kawasan khusus, yaitu Pecinan. Di Malang, kawasan Pecinan terletak di sekitar Jalan Pasar Besar dan sekitarnya. Di kawasan ini, mereka menetap di rumah toko (ruko) yang berfungsi sebagai tempat tinggal sekaligus lokasi usaha. Kehidupan komunitas ini sangat erat kaitannya dengan aktivitas perdagangan dan jasa, serta membentuk jaringan ekonomi tersendiri yang cukup kuat di tengah kota.

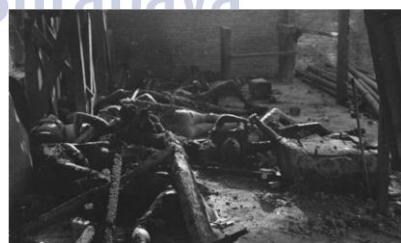
Setelah penghapusan *Wijkenstelsel* pada 1918, orang-orang Tionghoa mulai menyebar ke wilayah lain di Kota Malang. Kelompok Tionghoa

Peranakan, yang lebih lama tinggal di Indonesia dan telah banyak berasimilasi dengan budaya lokal, cenderung memilih tempat tinggal di daerah yang lebih luas seperti Jalan Veteran, Ijen, dan sekitarnya. Rumah-rumah mereka banyak yang bergaya Eropa, mencerminkan status sosial ekonomi menengah ke atas dan integrasi mereka dalam struktur sosial kolonial Hindia Belanda<sup>39</sup>.

Dari segi ekonomi, komunitas Tionghoa dikenal sebagai kelompok yang ulet dan mampu bertahan dalam berbagai kondisi. Mereka mendominasi sektor perdagangan, distribusi barang kebutuhan pokok, hingga industri rumah tangga. Pada masa pendudukan Jepang, komunitas ini mengalami tekanan yang cukup besar, banyak usaha mereka ditutup, dan mereka dikenai pajak tinggi. Namun pasca kemerdekaan, terutama pada era Orde Baru, mereka kembali bangkit dan memainkan peran signifikan dalam ekonomi lokal, meskipun masih menghadapi diskriminasi sosial dan politik.

Tidak hanya berperan dalam bidang ekonomi, komunitas Tionghoa juga aktif dalam kegiatan sosial dan budaya. Mereka mendirikan lembaga pendidikan, organisasi sosial, serta tempat ibadah seperti Klenteng Eng An Kiong yang menjadi simbol spiritual dan budaya mereka. Dalam kehidupan sehari-hari, komunitas ini juga menunjukkan tingkat akulturasi tinggi, seperti penggunaan bahasa Jawa dalam berkomunikasi, keterlibatan dalam kegiatan gotong royong, dan partisipasi dalam perayaan-perayaan lokal.

Pada masa-masa tertentu, komunitas Tionghoa juga menghadapi konflik dan kekerasan. Salah satunya adalah peristiwa Margosono tahun 1947, di mana terjadi kerusuhan yang berdampak pada warga Tionghoa di Malang. Meskipun demikian, secara umum hubungan antara masyarakat Tionghoa dengan penduduk pribumi di Malang berlangsung relatif harmonis. Kedekatan geografis dan interaksi sosial-ekonomi yang terus-menerus membentuk jaringan sosial yang kuat antara kedua kelompok<sup>40</sup>.



**Gambar 1.** Kondisi pabrik pengawetan makanan di Gadang, lokasi di mana mayat-mayat korban kekerasan terhadap orang Tionghoa dibakar.

<sup>38</sup> "Dinamika Pecinan Kecil Kota Malang dalam Aturan Wijkenstelsel," diakses 30 Mei 2025, <https://malangpagi.com/dinamika-pechinan-kecil-kota-malang>.

<sup>39</sup> Jurnal Humaniora UGM. (2025). Pers Melayu, Etnik Thionghoa, dan Nasionalisme di Kota Malang 1920. Diakses 30 Mei 2025.

<sup>40</sup> Coppel, Charles A. Ethnic Chinese Business in Asia: History, Culture and Business Enterprise, Routledge, 2000, hlm. 85–87

Jumlah etnis Tionghoa di Indonesia memang tergolong kecil, sekitar 3% dari total populasi<sup>41</sup>. Namun, kontribusi mereka terhadap ekonomi dan pembangunan kota sangat besar. Di Malang, komunitas Tionghoa menjadi bagian penting dari wajah kota: mereka menggerakkan pasar, mendirikan toko, rumah makan, apotek, percetakan, hingga bisnis teknologi. Mereka juga ikut mewarnai kehidupan seni dan budaya, dengan mempertahankan tradisi seperti Cap Go Meh, Barongsai, serta musik dan tari khas Tionghoa.

Keberadaan komunitas Tionghoa di Malang adalah bukti nyata dari proses sejarah panjang yang membentuk identitas kota. Mereka datang sebagai pendatang, lalu menetap, beradaptasi, dan kini menjadi bagian penting dalam jaringan sosial, ekonomi, dan budaya kota Malang. Dengan semangat kerja keras, keterbukaan terhadap budaya lokal, dan solidaritas internal yang kuat, komunitas ini telah melewati berbagai tantangan zaman dan tetap eksis hingga kini, menjadi salah satu pilar dalam keberagaman masyarakat Kota Malang.

Pada Desember 1949, terjadi serangkaian aksi kekerasan terhadap warga sipil di Malang, khususnya komunitas Tionghoa. Insiden mencakup perampasan kendaraan dan penggedoran rumah-rumah, termasuk pembunuhan terhadap seorang gadis Tionghoa bernama Tjan Sien Nio yang ditembak mati saat bersepeda di Jalan Tongan setelah sepedanya dirampas<sup>42</sup>. Kwee Thiam Tjing mencatat bahwa gerombolan bersenjata di bawah pimpinan Djajino dan Djaliteng menjadi aktor utama dalam kekerasan ini. Mereka tidak hanya menjarah rumah penduduk Tionghoa, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal, tetapi juga merusak kuburan Belanda di daerah Klodjen Lor untuk mengambil barang-barang berharga.

Menurut Remco Raben, kekerasan yang menimpa warga Tionghoa selama periode revolusi kemerdekaan tidak sepenuhnya terkait dengan konflik militer antara Belanda dan Republik Indonesia, melainkan lebih merupakan bentuk terorisme lokal dan kekerasan massa yang menargetkan kelompok rentan tanpa perlindungan politik. Di Malang, komunitas Tionghoa yang sebelumnya mengungsi dari Surabaya pascaperistiwa 10 November 1945 relatif aman karena berada di bawah perlindungan Palang Merah Tionghoa<sup>43</sup>. Sebaliknya, kelompok pedagang Tionghoa di kawasan Kajoetangan menjadi korban penjarahan, sementara warga yang tinggal di sepanjang jalan utama menjadi sasaran aksi teror dengan dinamit.



**Gambar 2.** Pemakaman massal bagi korban kekerasan yang dilakukan oleh Chung Hua Tsung Hui.

Banyaknya sejumlah kekerasan besar-besaran menimpa komunitas Tionghoa. Rumah-rumah di kawasan Bromo, Ardjuno, Bandhuisweg, Ijen, serta milik tokoh-tokoh seperti Tjon Sie Lin dan Mr. The Bo Djwan mengalami perusakan dan pembakaran. Kantor Chung Hwa Tsung Hui, pabrik minyak, gudang beras, dan dua pabrik es juga dirusak. Di Jalan Klenteng, Kebalen Wetan, dan Kotalama, puluhan rumah, termasuk perusahaan milik Mr. Lim King Tjoe, dibakar habis. Selain itu, sekitar dua puluh orang Tionghoa di daerah Kutobedah dan Buring menjadi korban pembantaian, termasuk Mr. Yap Tik Poen dan keluarganya. Lim Kway Tjing dan Tho Koen Tiong yang berusaha melindungi harta benda mereka juga menjadi korban kekejaman, ditembak dan dibakar hidup-hidup.

Dampak dari pembantaian masif ini sangat berat bagi komunitas Tionghoa di Malang. Selain kehilangan nyawa dan harta benda, trauma psikologis meluas yang menimbulkan ketakutan dan rasa tidak aman di kalangan warga Tionghoa. Banyak yang kemudian memilih mengungsi atau menyembunyikan identitas mereka untuk menghindari kekerasan lebih lanjut. Kejadian ini juga memperburuk hubungan antar-etnis di Malang, menimbulkan ketegangan sosial yang bertahan lama serta memengaruhi dinamika politik dan ekonomi lokal pada masa setelahnya.

#### D. Usaha dan Mata Pencaharian Orang Tionghoa Malang

Pada dekade 1940-an, komunitas Tionghoa di Malang memegang peran penting dalam struktur ekonomi lokal melalui beragam kegiatan usaha<sup>44</sup>. Selain aktif dalam sektor perdagangan, mereka juga mengelola bidang percetakan, hiburan, kesehatan, perhotelan, serta kegiatan sosial dan pendidikan. Diversifikasi usaha ini mencerminkan integrasi sosial yang kuat serta kemampuan adaptasi terhadap perubahan politik, baik pada masa kolonial, pendudukan Jepang, maupun awal kemerdekaan.

<sup>41</sup> Ricklefs, M.C. A History of Modern Indonesia Since c.1200, 4th Edition, Macmillan, 2008, hlm. 159–160.

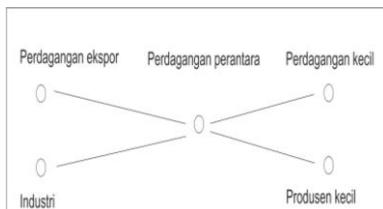
<sup>42</sup> Suryadinata, Leo. Ethnic Chinese As Southeast Asians, Institute of Southeast Asian Studies, 1997, hlm. 73–75.

<sup>43</sup> Hudiyanto, R. (2020). "Menimbun Barang Menuai Prasangka: Ekonomi Kota Malang pada Era Pemerintahan Jepang

(1942-1945)." Jurnal Sejarah dan Budaya, Universitas Negeri Malang.

<sup>44</sup> Liem Twan Djie, Perdagangan Perantara Distribusi Orang-Orang Cina di Jawa (Jakarta: Bhratara, 1961), 25.

Secara historis, etnis Tionghoa dikenal sebagai penggerak ekonomi di Hindia Belanda, khususnya sebagai pedagang perantara yang menjembatani produk lokal dengan pasar ekspor. Mereka turut terlibat dalam distribusi komoditas penting seperti garam dan cendu. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh pemahaman mereka terhadap pasar domestik dan kemampuan adaptif yang tinggi. Nilai-nilai seperti hemat, kerja keras, serta keterampilan wirausaha turut memperkuat posisi mereka dalam perekonomian sekaligus membangun penerimaan sosial dari masyarakat setempat.



Gambar 3. Sketsa Sederhana Perdagangan Koleksi

Dalam karyanya *Perdagangan Perantara Distribusi Orang Cina di Jawa*, Liem Twan Djie mengklasifikasikan aktivitas dagang masyarakat Tionghoa di Jawa menjadi tiga kategori utama berdasarkan skala pasar: perdagangan besar, perantara, dan kecil. Perdagangan besar merujuk pada kegiatan ekspor-impor yang umumnya terpusat di wilayah pesisir karena akses langsung ke jalur perdagangan internasional. Namun, karena letak geografis Malang yang berada di wilayah pedalaman, partisipasi masyarakat Tionghoa setempat dalam perdagangan besar dinilai relatif terbatas.

Pada periode 1940–1959, sejumlah tokoh Tionghoa memainkan peran penting dalam perdagangan besar di Malang. Salah satunya adalah Oen Tjiang Bing, pendiri Toko Oen, sebuah restoran dan pabrik roti bergaya Eropa–Tionghoa yang berdiri sejak 1930-an di kawasan Kayutangan. Tempat ini menjadi ruang sosial bagi kalangan elit Belanda, Indo-Eropa, dan pejabat lokal, serta tetap eksis hingga kini sebagai warisan budaya kuliner Malang<sup>45</sup>.

Tokoh lainnya meliputi Lie Swan Tjiang, pedagang grosir sembako di Pasar Besar Malang yang dikenal sebagai pemasok utama bahan pokok ke toko-toko kecil, serta Tan Kie Bie, pengusaha tekstil dan batik dengan jaringan dagang ke sentra produksi di Solo dan Pekalongan. Sementara itu, Goan Tjong Hoo mengelola gudang logistik pangan di Blimbing dan Lawang, memainkan peran kunci dalam distribusi bahan pokok secara regional<sup>46</sup>.

Di sektor kesehatan tradisional, keluarga The yang berdomisili di kawasan Pecinan Sukoharjo menjalankan toko obat yang menjual produk herbal impor dari Tiongkok dan melayani beragam kalangan. Aktivitas dagang para tokoh ini tergolong sebagai bentuk perdagangan besar karena cakupan usaha yang luas, jaringan distribusi antardaerah, serta kekuatan modal dan pengaruh ekonomi yang signifikan<sup>47</sup>.

Toko Oen sendiri mencerminkan keberhasilan integrasi ekonomi dan budaya. Didirikan oleh Liem Gien Nio dan Oen Tjoen Hok, restoran ini menyajikan menu khas perpaduan Eropa dan lokal, seperti es krim handmade, steak lidah, dan nasi goreng. Meski berpindah kepemilikan pada 1989, Toko Oen tetap mempertahankan resep asli dan suasana klasiknya. Dengan arsitektur kolonial dan interior khas era Hindia Belanda, tempat ini tidak hanya menjadi pusat kuliner, tetapi juga destinasi wisata sejarah yang memperkuat identitas multikultural Malang<sup>48</sup>.



Gambar 4. Toko Oen Malang 1940

Foto ini menunjukkan fasad Toko Oen dengan papan nama besar bertuliskan "Restaurant & Ice Cream Palace" serta suasana jalan di depannya yang ramai dengan pejalan kaki dan pengendara sepeda. Bangunan ini mencerminkan gaya arsitektur kolonial Belanda yang khas pada masa itu.

Selain berkiprah dalam perdagangan besar, komunitas Tionghoa di Malang juga memainkan peran sentral sebagai pedagang perantara (middlemen). Dalam peran ini, mereka tidak memproduksi barang dagangan secara langsung, melainkan bertindak sebagai penghubung antara produsen baik petani, pengrajin, maupun importir dengan konsumen akhir atau pedagang kecil. Melalui mekanisme ini, etnis Tionghoa memastikan kelancaran distribusi barang dari sentra produksi seperti Solo, Pekalongan, Surabaya, dan Pasuruan ke pasar lokal di Malang dan sekitarnya.

Barang yang diperdagangkan mencakup hasil bumi seperti beras, gula, jagung, singkong, dan kopra, serta produk kerajinan rumah tangga seperti tikar, topi pandan, dan tembikar. Tokoh seperti Tan Kie Bie dikenal sebagai agen tekstil yang

<sup>45</sup> Eva A. Sundari, *Kisah Tionghoa Peranakan di Malang* (Malang: Penerbit Areta, 2012), 78.

<sup>46</sup> Liem Twan Djie. 1995. *Perdagangan Perantara Distribusi Orang-Orang Cina di Jawa*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.

<sup>47</sup> Didi Kwartanada, *Orang Tionghoa dan Kota di Indonesia* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2010), hlm. 270–276.

<sup>48</sup> KITLV, Jalan Petjinen di Malang, 1935, foto oleh Studio Malang, Koleksi Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV), Leiden.

mendatangkan kain dari luar kota, sementara Lie Swan Tjiang dan Goan Tjong Hoo mengelola distribusi bahan pokok ke berbagai wilayah, termasuk Blimbing dan Batu. Dalam bidang obat-obatan tradisional, keluarga The berperan sebagai distributor produk herbal impor dari Surabaya dan Singapura.

Peran pedagang perantara Tionghoa menjadi vital karena sebagian besar masyarakat lokal, terutama dari kalangan pribumi pedesaan, tidak memiliki akses langsung ke pusat produksi maupun jaringan distribusi besar. Keberhasilan etnis Tionghoa dalam bidang ini ditopang oleh kekuatan modal, jaringan sosial yang luas, serta keberadaan sistem distribusi informal yang efisien. Dalam struktur ekonomi kolonial hingga awal kemerdekaan, mereka menjadi elemen penting yang menjembatani sektor produksi dan konsumsi masyarakat.

Perdagangan kecil dalam komunitas Tionghoa di Malang pada masa kolonial terbagi menjadi dua bentuk, yaitu perdagangan kecil koleksi dan distribusi. Perdagangan koleksi melibatkan pembelian hasil bumi dan kerajinan dari masyarakat dalam jumlah kecil untuk kemudian dijual kembali kepada pedagang perantara. Sebaliknya, perdagangan distribusi berfokus pada penyaluran barang dagangan langsung ke konsumen dalam skala terbatas.

Pedagang kecil Tionghoa menjalankan aktivitas ini secara mobile, tidak hanya di kawasan Pecinan tetapi juga menjangkau permukiman pribumi. Mereka membawa dagangan sambil membunyikan alat khas berbunyi derik, dikenal sebagai *kelontong*, guna menarik perhatian pembeli. Pola perdagangan ini menunjukkan strategi adaptif dalam membangun jaringan pelanggan serta memperkuat kehadiran ekonomi komunitas Tionghoa di ruang-ruang sosial masyarakat lokal.



Gambar 5. Perantau Tionghoa Asal Hokkian menjadi Pedagang Keliling di Tanah Jawa pada 1930-an

Dalam gambar tersebut, terdapat seorang pedagang kelontong yang mendistribusikan barang dagangannya dengan cara berkeliling. Alatnya sangat sederhana, yaitu sebilah tongkat bambu, yang dihubungkan dengan dua wadah di sisi depan dan belakang sama berat agar seimbang ketika membawanya. Barang dagangannya diletakkan

dalam lemari-lemari kecil atau kotak-kotak kecil. Pedagang kelontong menjual sandang, sutera, renda, sulaman, barang-barang kelontong, kadang juga terdapat barang aneh buatan Cina, Seperti hiasan dan peralatan rumah tangga.

Komunitas Tionghoa di Malang memiliki kontribusi strategis dalam membentuk identitas kota sebagai pusat perdagangan, budaya, dan pendidikan di Jawa Timur. Dengan dukungan jaringan ekonomi yang luas, modal sosial yang kuat, serta etos kerja yang tinggi, kelompok ini tidak hanya berperan sebagai pelaku ekonomi, tetapi juga sebagai aktor sosial yang berpengaruh. Konsentrasi pemukiman mereka di pusat kota dan wilayah strategis perdagangan mencerminkan posisi demografis dan ekonomi yang signifikan.

Komunitas ini membangun kohesi sosial melalui struktur internal berbasis keluarga, organisasi etnik, serta institusi keagamaan dan pendidikan. Meskipun kebijakan kolonial sempat menciptakan batas struktural antar etnis, interaksi ekonomi dan sosial yang bersifat pragmatis tetap terjalin dengan masyarakat lokal. Dalam periode penuh gejolak antara 1940 hingga 1959 yang mencakup masa akhir kolonialisme, pendudukan Jepang, hingga awal kemerdekaan komunitas Tionghoa menunjukkan tingkat resiliensi yang tinggi<sup>49</sup>. Mereka mampu mempertahankan jaringan ekonomi serta solidaritas internal, membuktikan bahwa kehadiran mereka di Malang merupakan hasil proses historis yang panjang dan terencana, bukan semata hasil adaptasi pasif terhadap dinamika politik yang berubah.

#### E. Interaksi Aktivitas Sosial antara Etnis Tionghoa dengan Pribumi di Kabupaten Malang

Pada kurun waktu 1940–1959, hubungan sosial antara komunitas Tionghoa dan masyarakat pribumi di Kabupaten Malang menunjukkan dinamika yang kompleks, seiring dengan perubahan politik dan sosial yang terjadi secara bertahap<sup>50</sup>. Periode ini meliputi fase penting dalam sejarah Indonesia, yakni akhir kolonialisme Belanda, pendudukan Jepang, masa revolusi kemerdekaan, hingga tahap awal stabilisasi pemerintahan Republik Indonesia.

Setiap fase tersebut memberikan pengaruh berbeda terhadap pola interaksi antar etnis. Meski demikian, secara historis komunitas Tionghoa telah hidup berdampingan dengan masyarakat pribumi, terutama di kawasan perkotaan dan daerah sekitarnya, menciptakan relasi sosial yang bersifat koeksistensial meski dibayangi oleh ketegangan struktural maupun tantangan politik.

Sebuah album foto berukuran sekitar 30 x 30 sentimeter itu masih terjaga dengan baik di sebuah rumah yang terletak di Jalan Candi Sewu nomor 4A,

<sup>49</sup> Leo Suryadinata, Etnis Tionghoa di Indonesia: Kumpulan Tulisan (Jakarta: LP3ES, 1999), 45.

<sup>50</sup> Onghokham, Riwayat Tionghoa Peranakan di Jawa (Jakarta: Komunitas Bambu, 2009), 123.

Kota Malang<sup>51</sup>. Album tersebut berisi banyak dokumentasi pertunjukan dari Ang Hien Hoo, sebuah kelompok wayang orang khas Tionghoa, termasuk momen ketika mereka tampil dalam festival di Solo pada tahun 1950-an<sup>52</sup>.



Gambar 6. Shirley Kristiani Widjihandayani Menunjukkan Foto Lawas Etnis Tionghoa Malang

Perkumpulan *Ang Hien Hoo* di Kota Malang memiliki sejarah panjang dalam pelestarian budaya lokal, khususnya kesenian tradisional. Salah satu inisiatif budayanya adalah pembentukan kelompok wayang orang yang dimulai sejak tahun 1959 oleh Liem Ting Tjwan (Tangkar), bersama rekannya Tjhma Hoo Liong (Hardjoadiwinoto) dan Wat Ping<sup>53</sup>. Upaya ini mendapat dukungan dari Shirley Kristiani Widjihandayani (Tjhma Hiang Nio), putri Hardjoadiwinoto, yang turut aktif sebagai anggota dan masih terlibat hingga kini.

Meski awalnya *Ang Hien Hoo* didirikan pada tahun 1905 sebagai organisasi sosial untuk persemayaman jenazah, lembaga ini kemudian memperluas aktivitasnya ke bidang seni dan budaya<sup>54</sup>. Kegiatan seperti permainan billiard, catur, musik klasik Tionghoa, hingga pertunjukan tari menjadi bagian dari aktivitas rutin. Sebelum berkembang ke seni wayang orang, kelompok ini lebih dulu fokus pada tari tradisional Jawa, seperti *srimpi*, dengan mendatangkan guru tari khusus. Keberhasilan pementasan tari pertama yang digelar di aula utama *Ang Hien Hoo* menarik minat masyarakat luas, sehingga mendorong partisipasi anak-anak dan keluarga dalam kegiatan seni tersebut.

Interaksi sosial antara komunitas Tionghoa dan masyarakat pribumi di Kabupaten Malang pada periode 1940–1959 berlangsung dalam dinamika yang kompleks, dipengaruhi oleh konteks kolonial, pendudukan Jepang, masa revolusi, dan awal kemerdekaaan<sup>55</sup>. Komunitas Tionghoa umumnya tinggal berdekatan, seperti di kawasan Pecinan, namun kehidupan sosial mereka juga bersinggungan dengan masyarakat pribumi dalam keseharian,

termasuk melalui kegiatan keagamaan, organisasi sosial, dan perayaan budaya. Meskipun hubungan ini tidak selalu harmonis karena adanya sekat-sekat sosial dan kultural, masa krisis seperti pendudukan Jepang dan revolusi justru mendorong terbentuknya solidaritas lintas etnis.

Beberapa warga Tionghoa turut mendukung perjuangan kemerdekaan melalui kegiatan sosial, meskipun sebagian lainnya menghadapi kecurigaan karena dianggap tidak berpihak secara eksplisit. Pascakemerdekaan, kebijakan nasional yang mendorong integrasi memberi ruang partisipasi yang lebih luas bagi warga Tionghoa dalam kehidupan sosial. Hal ini tampak dalam keterlibatan mereka dalam kegiatan kampung seperti ronda, kerja bakti, dan perayaan hari besar bersama masyarakat pribumi.

Di bidang pendidikan, mulai muncul keterbukaan pasca-kemerdekaan, di mana sekolah-sekolah Tionghoa seperti THHK menerima murid non-Tionghoa, dan sebaliknya, pelajar Tionghoa mulai belajar di sekolah negeri. Proses ini membuka ruang pergauluan lintas etnis sejak dulu. Selain itu, partisipasi warga Tionghoa dalam organisasi sosial dan kemanusiaan seperti PMI Malang dan perkumpulan sosial-keagamaan juga mencerminkan arah integrasi sosial yang lebih inklusif.

Relasi sosial juga berkembang secara informal di lingkungan kampung dan pasar lokal, termasuk melalui permainan anak-anak dan hubungan antar tetangga. Bahkan, dalam beberapa kasus terjadi perkawinan campuran, meski belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat. Secara keseluruhan, interaksi sosial antara warga Tionghoa dan pribumi di Malang pada masa ini menunjukkan potensi integrasi dan kohesi sosial yang tumbuh seiring semangat kebangsaan dan pengalaman hidup bersama.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa etnis Tionghoa di Malang pada periode 1940 hingga 1959 hidup dalam komunitas yang terorganisir melalui lembaga sosial, pendidikan, dan keagamaan. Mereka memainkan peran penting dalam sektor ekonomi, khususnya perdagangan dan jasa, serta mampu mempertahankan eksistensinya di tengah berbagai perubahan politik, mulai dari masa kolonial Belanda, pendudukan Jepang, hingga awal kemerdekaan Indonesia. Meskipun cenderung membentuk kelompok yang relatif eksklusif, tetap terjadi interaksi yang signifikan dengan masyarakat

<sup>51</sup> Perkumpulan Wayang Orang Tionghoa di Malang,” Harian Surya, 31 Januari 2023.

<sup>52</sup> Melestarikan Budaya Jawa Lewat Wayang Orang,” Harian Surya, 31 Januari 2023.

<sup>53</sup> Michael R. Godley, *The Mandarin-Capitalists from Nanyang: Overseas Chinese Enterprise in the Modernisation of*

China 1893–1911 (Cambridge: Cambridge University Press, 1983), 210–212.

<sup>54</sup> Leo Suryadinata, *Chinese Indonesians: State Policy, Monuments, and Identity* (Singapore: ISEAS Publishing, 2005), 95.

<sup>55</sup> Leo Suryadinata, *Chinese Indonesians: State Policy, Monuments, and Identity* (Singapore: ISEAS Publishing, 2005), 97–100.

pribumi, terutama dalam bidang perdagangan dan pendidikan. Dalam ranah politik, posisi etnis Tionghoa cukup kompleks; mereka sering kali menghadapi tekanan identitas, namun juga menunjukkan upaya loyalitas terhadap negara. Oleh karena itu, keberadaan mereka tidak dapat dilihat secara hitam-putih, melainkan perlu dipahami dalam konteks sosial-politik yang lebih luas. Kajian ini menegaskan pentingnya pengakuan terhadap kontribusi etnis Tionghoa dalam sejarah lokal dan nasional sebagai bagian dari upaya membangun masyarakat Indonesia yang inklusif dan pluralistik.

#### B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan. Pertama, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan kajian lanjutan yang lebih mendalam dan spesifik, baik dalam hal rentang waktu maupun tema kajian. Topik-topik seperti peran perempuan Tionghoa, dinamika pendidikan, serta relasi sosial antar-etnis di wilayah Malang dan sekitarnya dapat menjadi fokus yang relevan untuk memperkaya pemahaman tentang komunitas Tionghoa. Kedua, bagi pemerintah daerah dan masyarakat, penting untuk memberikan pengakuan terhadap kontribusi etnis Tionghoa dalam sejarah lokal sebagai bagian dari upaya membangun masyarakat yang inklusif dan menghargai keberagaman. Pengakuan ini dapat diwujudkan melalui kebijakan budaya, pendidikan, maupun pelestarian warisan sejarah. Ketiga, bagi dunia akademik, penting untuk terus mengembangkan kajian sejarah lokal agar narasi sejarah Indonesia menjadi lebih beragam dan representatif, tidak hanya terfokus pada peristiwa besar berskala nasional, tetapi juga memberi ruang bagi sejarah komunitas yang selama ini kurang mendapatkan perhatian. Dengan demikian, penelitian sejarah dapat berperan sebagai sarana untuk membangun pemahaman yang lebih utuh mengenai identitas kebangsaan Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku

Andjarwati Noordjannah, Komunitas Tionghoa di Surabaya (Yogyakarta: Ombak, 2010), hlm. 1

R.Z. Leirissa, Sejarah Maritim Indonesia: Jalur Rempah dan Dinamika Asia Tenggara (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2021), hlm. 45–47.

Hari Poerwanto, Orang Tiongkok Khek Dari Singkawang (Depok: Komunitas Bambu, 2005), hlm. 43.

Leo Suryadinata, Dilema Minoritas Tionghoa (Jakarta: Grafiti Pers, 1984).

Suryadinata, Leo. Etnis Tionghoa dan Nasionalisme Indonesia. Jakarta: LP3ES, 1999, hlm. 75–77.

Leo Suryadinata, “Negara dan Etnis Tionghoa: Kasus Indonesia” (Jakarta: LP3ES, 2009).

Sjamsuddi, Helius. 2007. Metodologi Sejarah. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Suryadinata, Leo. The Chinese Minority in Indonesia: Seven Papers. Singapore: ISEAS Publishing, 2007.

Mona Lohanda, The Kapitan Tionghoa of Batavia 1837-1942, (Jakarta: Djambatan, 2001), hlm. 10.

Shaifuddin Bahrum, Cina Peranakan Makassar, Pembauran Melalui Perkawinan Antarbudaya, (Makassar: Yayasan Baruga Nusantara, 2003), hlm. 38.

Leo Suryadinata. Negara dan Etnis Tionghoa, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2002), Hlm. 119

Mona Lohanda, The Capitan Tionghoa of Batavia 1837-1942, (Jakarta: Djambatan, 2001), Hlm. 10

Yerry Wirawan. Sejarah Masyarakat Tionghoa Dari Abad Ke-17 Hingga Ke-20. (Jakarta: Kepustakaan Popular Gramedia, 2013) Hlm. 5

Ong Hok Ham, Riwayat Tionghoa Peranakan di Jawa (Jakarta: Kompas, 2003), hlm. 45.

A. Dahana. “Kegiatan Awal Masyarakat Tionghoa di Indonesia” Jurnal Wacana. Vol. 2. No. 1 (April 2000). Hlm. 56

Dias Pradadimara & Muslimin A. R. Effendy. Kontinuitas & Perubahan Dalam Sejarah Sulawesi Selatan. (Yogyakarta: Penerbit Ombak, Oktober 2004) Hlm. 217

Mona Lohanda, The Chinese in Java 1800–1942 (Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka, 1996), hlm. 150–152.

Mona Lohanda, The Chinese in Java 1800–1942 (Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka, 1996), hlm. 40–45.

Mona Lohanda, The Chinese in Java 1800–1942 (Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka, 1996), hlm. 50–55; Robert Van Niel, The Emergence of a National Economy: An Economic History of Indonesia, 1800–2000 (Leiden: KITLV Press, 2001), hlm. 78–80.

Yerry Wirawan, Sejarah Perdagangan Etnis Tionghoa di Nusantara (Jakarta: Pustaka Sejarah Nusantara, 2015), hlm. 72.

Yerry Wirawan, Sejarah Etnis Tionghoa di Jawa Timur (Surabaya: Penerbit Sejarah Nusantara, 2018), hlm. 120.

Leonard Blussé, Strange Company: Chinese Settlers, Mestizo Women and the Dutch in VOC Batavia (Dordrecht: Foris Publications, 1986), hlm. 92–95.

Yerry Wirawan, Etnis Tionghoa di Indonesia: Dari Komunitas ke Komunitas (Yogyakarta: Ombak, 2010), hlm. 137.

Yerry Wirawan, Etnis Tionghoa di Indonesia: Dari Komunitas ke Komunitas (Yogyakarta: Ombak, 2010), hlm. 85–87.

Mely G. Tan, Etnis Tionghoa di Indonesia: Kumpulan Tulisan (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 47.

Leo Suryadinata, The Chinese Minority in Indonesia: Seven Papers (Singapore: Heinemann Educational Books, 1978), hlm. 52

Charles A. Coppel, Indonesian Chinese in Crisis (Singapore: Oxford University Press, 1983), hlm. 65.

Leo Suryadinata, Peran Etnis Tionghoa dalam Perekonomian Indonesia (Jakarta: LP3ES, 1991), hlm. 73.

Leo Suryadinata, Peran Etnis Tionghoa dalam Perekonomian Indonesia (Jakarta: LP3ES, 1991), hlm. 85.

Arief Budiman, Etnis Tionghoa di Indonesia: Sejarah, Sosial, dan Politik (Jakarta: LP3ES, 2006), hlm. 112–115; Leo Suryadinata, The Chinese Minority in Indonesia: Policy, Conflict and Change (Singapore: ISEAS Publishing, 2015), hlm. 97–100.

Kiki Patmila Akbar, "Masyarakat Muslim Tionghoa di Kota Makassar Tahun 1969 1998". (Makassar, Unhas: Skripsi Departemen Ilmu Sejarah, 2020) Hlm. 33

Coppel, Charles A. Ethnic Chinese Business in Asia: History, Culture and Business Enterprise, Routledge, 2000, hlm. 85–87

Ricklefs, M.C. A History of Modern Indonesia Since c.1200, 4th Edition, Macmillan, 2008, hlm. 159–160.

Suryadinata, Leo. Ethnic Chinese As Southeast Asians, Institute of Southeast Asian Studies, 1997, hlm. 73–75.

Liem Twan Djie, Perdagangan Perantara Distribusi Orang-Orang Cina di Jawa (Jakarta: Bhratara, 1961), 25.

Eva A. Sundari, Kisah Tionghoa Peranakan di Malang

(Malang: Penerbit Areta, 2012), 78.

Liem Twan Djie. 1995. Perdagangan Perantara Distribusi Orang-Orang Cina di Jawa. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.

Didi Kwantanada, Orang Tionghoa dan Kota di Indonesia (Jakarta: Komunitas Bambu, 2010), hlm. 270–276.

KITLV, Jalan Petjinan di Malang, 1935, foto oleh Studio Malang, Koleksi Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV), Leiden.

Leo Suryadinata, Etnis Tionghoa di Indonesia: Kumpulan Tulisan (Jakarta: LP3ES, 1999), 45.

Ongkokham, Riwayat Tionghoa Peranakan di Jawa (Jakarta: Komunitas Bambu, 2009), 123.

Perkumpulan Wayang Orang Tionghoa di Malang," Harian Surya, 31 Januari 2023.

Melestariakan Budaya Jawa Lewat Wayang Orang," Harian Surya, 31 Januari 2023.

Michael R. Godley, The Mandarin-Capitalists from Nanyang: Overseas Chinese Enterprise in the Modernisation of China 1893–1911 (Cambridge: Cambridge University Press, 1983), 210–212.

Leo Suryadinata, Chinese Indonesians: State Policy, Monuments, and Identity (Singapore: ISEAS Publishing, 2005), 95.

Leo Suryadinata, Chinese Indonesians: State Policy, Monuments, and Identity (Singapore: ISEAS Publishing, 2005), 97–100.

## **B. Artikel Berita / Internet**

"Sejarah Komunitas Tionghoa di Malang," Malang Retro, diakses pada 27 Februari 2025.

"Menilik Sejarah dan Dinamika Pecinan Malang," Terakota.id, diakses 27 Februari 2025.

"Sejarah Pecinan di Kota Malang Sejak Zaman Kolonial," detik.com, diakses 27 Februari 2025

Yunita Ariani, "Sejarah Permukiman Etnis Tionghoa di Malang," Jurnal Sejarah dan Budaya 14, no. 2 (2022): 45,

<https://journal2.um.ac.id/index.php/sejarah-dan-budaya/article/download/29834/10952>

"Menilik Akar Sejarah dan Dinamika Pecinan Malang," Terakota.id, diakses 27 Mei 2025, <https://www.terakota.id/menilik-akar-sejarah-dan-dinamika-pechinan-malang>

"Dinamika Pecinan Kecil Kota Malang dalam Aturan Wijkenstelsel," diakses 30 Mei 2025,

[https://malangpagi.com/dinamika-pecinan-kecil-kota-malang.](https://malangpagi.com/dinamika-pecinan-kecil-kota-malang)

### **C. Wawancara**

Wawancara dengan wakil ketua pengurus perkumpulan Dharma Warga Malang bapak Ken Kriswanto (Den Jian Kang) pada 2 februari 2025 pukul 11.00 WIB di kantor Perkumpulan Dharma Warga.

### **D. Jurnal Penelitian Ilmiah**

Jurnal Humaniora UGM. (2025). Pers Melayu, Etnik Thionghoa, dan Nasionalisme di Kota Malang 1920. Diakses 30 Mei 2025.

Hudiyanto, R. (2020). “Menimbun Barang Menuai Prasangka: Ekonomi Kota Malang pada Era Pemerintahan Jepang (1942-1945).” Jurnal Sejarah dan Budaya, Universitas Negeri Malang.

